

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Agustina, Rosa. 2022. *Hukum Perdata*. Tangerang: Universitas Terbuka.
- Ali, Zainuddin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asyhadie, Z. 2020. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Indonesia: Rajawali Pers.
- Bagenda, Cristina. 2023. *Hukum Perdata*. Penerbit: Penerbit Widina Disertasi. Bandung: Alfabeta.
- Yulia, S.H. 2015. *Buku Hukum Ajar Hukum Perdata*. Aceh: CV. Biena Edukasi.
- Hadikusuma, Hilman. 2022. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Kharlie, Ahmad dan Tholabi. 2022. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi, Lilik. 2018. *Eksistensi dan Dinamika Hukum Adat Bali Waris Dalam Perspektif Masyarakat Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Penerbit Alumni.
- Mustari, Suriyaman. 2020. *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nurhayati, Y. 2020. *Buku Ajar: Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media
- Poespasari, E. D., & SH, M. (2018). *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- Ramdhan, M. 2021. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Salim H.S. 2014. *Pengantar Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta: Sinar Grafika
- Sanjaya, Wina. 2015. *Penelitian Pendidikan (Jenis, Metode dan Prosedur)*. Jakarta: Prenadamedia Group:
- Sembiring, Rosnidar. 2016, *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Simanjuntak, P.N.H. 2019. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Soesilowati Mahdi, Sri. 2005. *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Gitamajaya

Soimin, Soedharyo. 2010. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sulistiani, Siska Lis, dan M. E. Sy. *Hukum Adat di Indonesia*. Bumi Aksara, 2021.

Suparman, Eman. 2018. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: PT Refika Aditama.

Suratman, D. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, Cv.

Utomu, Laksanto. 2016. *Hukum Adat*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Widagdo, Setiawan. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya.

Artikel dalam Jurnal

Anggraini, Ratih, dkk. (2020). "Hukum Adat Kekeluargaan Dan Kewarisan Di Bali". *Pariksa : Jurnal Hukum Agama Hindu*, Volume 2, Nomor 1 (hlm. 95-102).

Benuf, K., dan Azhar, M. (2020). "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer". *Gema Keadilan*, Volume 7, Nomor 1 (hlm. 20-33).

Disemadi, H. S. (2022). "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum". *J. Judic. Rev*, Volume 24, Nomor 2 (hlm.289-304).

Fatmawati, K. (2021). Menyama Braya dalam Upanisad. *JAPAM (Jurnal Pendidikan Agama)*, Volume 1, Nomor 1, (hlm.62-67).

Fitriyah, L., Muhibbin, M., dan Bastomi, A. (2021). "Pembagian Hak Waris Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata". *Jurnal Dinamika* Volume 27, Nomor 8 (hlm.1215-1232).

Harahap, M. (2020). "Batas Kedewasaan Anak Untuk Cakap Hukum Dalam Perspektif Peraturan Di Indonesia". *JGSIMS: Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, Volume 1, Nomor 1,

Hastabrata, M. W., dan Septyningrum, S. M. (2024). "Perlindungan Hak Waris Perempuan Dalam Perspektif Hukum Adat Bali". *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, Volume 2, Nomor 1 (hlm. 44-55).

Keumala, D., & Setiyono, S. (2023). Problematika Hukum Pengampuan Dalam Proses

- Peralihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan. *Jurnal Hukum Nawasena Agraria*, Volume 1, Nomor 1, (hlm. 12-24).
- Navisa, F. D. (2022). “Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Pewarisan”. *Arena Hukum*, Volume 15, Nomor 2 (hlm. 307-324).
- Nur Fitriani Siregar, (2018) “Efektivitas Hukum”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Volume.18 Nomor.2, Sekolah Tinggi Agama Islam
- Panglipurjati, P. (2021). “Sebuah Telaah atas Regulasi dan Penetapan Pengampuan bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia dalam Paradigma Supported Decision Making”. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, Volume 6, Nomor 2, (hlm.79-109).
- Sharfina, V. H., & Sukananda, S. (2019). “Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang Yang Berada Dalam Pengampuan (Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/PDT. P/2015/PA. BTL)”. *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 3, Nomor 2 (hlm. 319-337).
- Siagian, E. D. S. (2023). Hak Mewaris Penyandang Disabilitas Mental Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Lex Privatum*, (hlm. 4-12).
- Suryanata, Ferry. (2021). “Hukum Waris Adat Bali dalam Pandangan Kesetaraan Gender”. *Belom Bahadat*, Volume 11, Nomor 2 (hlm. 46-64).
- Syahbandir, M. (2010). “Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1),(hlm. 1-13).
- Wirawan, I Ketut. 2017. “Hukum Adat Bali”. *Simdos UNUD*, Volume 7, Nomor 3 (hlm. 1-7)
- Wiryawan, I. W. G., Perbawa, K. S. L. P., dan Wiasta, I. W. (2015). Hukum Adat Bali di Tengah Modernisasi Pembangunan dan arus Budaya Global. *J. Bakti Sar*, Volume 4, Nomor 2 (hlm.169-178)
- Wulandari, S. A., dan Kusuma, F. D. (2023). “Analisis Penerapan Sistem Hukum Waris Patrilineal dalam Masyarakat Adat Bali”. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, Volume 3, Nomor 2 (hlm.80-85).
- Taufiq, M. (2021). “Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif”. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Volume 5, Nomor 2 (hlm.87-98).

SKRIPSI

- Azhar, Zulfachry. 2022. *Kedudukan Pengampu Dalam Mengelola Bagian Warisan Ahli Waris Yang Mengalami Keterbelakangan Mental*. Tugas Akhir (tidak

siterbitkan). Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Maulidin, F. (2021). *Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Dari Status Wali Pengampu (Studi Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Nomor 137/PDT. P/2019/PN. Mdn)* (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Medan Area).

Internet

Aulina, Laurences. 2020. “Sekilas Tentang Hukum Pengampuan” <https://www.kennywiston.com/sekilas-tentang-hukum-pengampuan/> dikutip pada tanggal 3 September 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara. 1974/No.1, Tambahan Lemnbaran Negara Nomor. 3019, LL SETNEG: 26 Halaman)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nomor 23 Tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016/Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871, LL SETNEG: 70 Halaman).

Putusan

Putusan Penetapan Permohonan Pengampuan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN.Sgr